



Ilustrasi biodiesel dari sawit (Canva)

Memahami Lebih Jauh Soal Biodiesel (B40)

Hilirisasi CPO terus dikebut pemerintah. Produk biodiesel paling mutakhir, B35, diskenariokan segera beranjak ke B40. Artinya, komposisi biodiesel sebagai campuran solar akan meningkat dari 35% menjadi 40%. Realisasi produk B40 diperkirakan akan menyedot pasokan CPO yang ada. Dibalik itu semua, alokasi CPO untuk menopang B40 dinilai berpotensi menurunkan volume ekspor. Kebutuhan CPO untuk B40 juga dapat mengganggu alokasi untuk pangan. Akankah produksi dalam negeri mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan untuk biodiesel tanpa mengorbankan ekspor dan sektor pangan?

**Selengkapnya di halaman 2*

Dana Bagi Hasil Dapat Menyejahterakan Daerah?

Ekspor produk CPO menempati posisi kedua sebagai industri paling menguntungkan. Manfaat besar dari sawit diupayakan pemerintah agar bisa dirasakan, bukan hanya oleh pekebun, tetapi memiliki dampak bagi kemajuan daerah dan masyarakat sekitar perkebunan. Untuk merealisasikan itu, pemerintah menetapkan kebijakan Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) untuk daerah melalui PP No. 38 Tahun 2023 dan Permenkeu Nomor 91 Tahun 2023 tentang DBH Sawit. Kebijakan ini dianggap sebagai 'oase' di tengah padang pasir setelah lebih dari satu dekade, pemerintah daerah menyuarakan kebutuhan itu.

**Selengkapnya di halaman 11*

Dunia Penerbangan Berbau Sawit

Dunia internasional tengah berupaya melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor. Industri penerbangan termasuk yang disorot karena turut menyumbang emisi gas rumah kaca, sebesar 2%. Penggunaan bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) menjadi salah satu solusi krusial dekarbonisasi. Kabar baiknya, Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyedia SAF. Berdasarkan proyeksi tim IPOSS, dengan ketersediaan UCO & POME di tahun 2030 sebesar 5,7 juta kilo liter, Indonesia akan mampu menghasilkan 4,3 juta kilo liter SAF.

**Selengkapnya di halaman 8*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Isu kelapa sawit begitu dinamis. Lika-liku kebijakan sawit kerap mengiringi perkembangan sektor ini. Perlu sinergi ragam pihak untuk terus mengawal industri ini. Karena mulai dari pekebun, masyarakat sekitar perkebunan, negara, hingga dunia internasional mengharapkan kontribusi optimal dari kelapa sawit. Di hadapan Anda sekarang, buletin edisi kedua yang mencoba merangkum banyak isu tersebut secara ringkas. Selamat membaca.

Menelisik Dilema Biodiesel (B40)



Menteri ESDM Arifin Tasrif menunjukkan B40 sebelum uji jalan kendaraan berbahan bakar B40 di Jakarta. (Humas Kementerian Ditjen EBTKE)

Hilirisasi kelapa sawit terus mengalami kemajuan, salah satunya untuk program biodiesel yang diproyeksikan menggantikan 100% BBM solar di masa depan. Kini, Pemerintah sudah mulai beranjak dari B35 ke B40. Walaupun sedang dalam masa uji coba, namun masih menyisakan banyak PR yang harus diperjelas.

Istilah B40 belakangan ini menjadi buah bibir. Namun apa sebenarnya B40 ini? Angka 40 setelah huruf "B" sebenarnya bermakna komposisi 40% biodiesel dicampur dengan 60% solar di dalam bahan bakar biosolar yang dijual di SPBU. Sebelumnya ada juga B35, yang berarti campuran biodieselnnya hanya 35%.

Program biodiesel pemerintah sejak 2015 sudah lebih tertata dan terus melaju dibandingkan sebelumnya. Dimulai dari B15 lalu naik menjadi B20, B30, hingga B35 sejak 1 Februari 2023. Dan kini, sedang digadang-gadang menuju B40. Melewati perjalanan cukup panjang, program biodiesel di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terbilang sukses diterapkan. Itu terjadi karena sudah ada kejelasan darimana sumber pembiayaan program, capaiannya juga lebih pasti, pun ketersediaan *feedstock* lebih stabil. Secara harga pun terpenuhi dengan skema insentif yang tepat sehingga tidak ada yang dirugikan, baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Adapun yang paling mutakhir, program B40, saat ini masih diuji coba penggunaannya pada sektor non-otomotif seperti alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, pembangkit listrik, kereta api dan angkutan laut. Setelah sebelumnya berhasil diuji coba pada kendaraan darat tanpa ada kendala apapun.

Berdasarkan perhitungan, kebutuhan CPO untuk menopang program B40 bisa mencapai 15,2 juta kiloliter (kl), dengan asumsi 40% dari kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,1 juta kl. Dengan kapasitas pabrik biodiesel saat ini, yakni 17,1 juta kl, diperkirakan produksi biodiesel akan dapat dipenuhi dari industri ini. Tetapi di sisi lain, ada hal yang perlu diperhatikan: peningkatan program B35 menjadi B40 menyedot CPO sekitar 2,6 juta ton, dari 10,6 juta ton (B35) menjadi 13,2 juta ton (B40).

Nah, peningkatan konsumsi CPO ini akan berpotensi menurunkan volume ekspor CPO. Pasalnya capaian produksi CPO tahun lalu hanya sekitar 50,1 juta ton, jika tidak diiringi dengan kenaikan produksi sebesar 5 - 7%, maka ekspor yang malah akan turun. Padahal dari hasil ekspor CPO dan produk turunannya, pemerintah akan mendapatkan penambahan devisa, selain Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).

Di sisi lain produksi dalam 1-2 tahun ke depan diperkirakan stagnan atau setidaknya naik 1-3%. Selain karena faktor La Nina, juga karena capaian program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih rendah, sehingga belum bisa diharapkan untuk meningkatkan produksi nasional. Padahal, tanaman sawit rakyat masih banyak yang rendah produktivitasnya (kurang dari 2 ton/ha), sebagai akibat minimnya pemupukan, penggunaan bibit palsu (kontaminasi dura tinggi), atau tanaman yang sudah tua.

Disinilah pentingnya dilakukan peremajaan sawit untuk menggantikan tanaman yang kurang produktif menjadi tanaman yang menggunakan bibit unggul.

IPOSS memandang, Program B40 akan berhasil diterapkan apabila memperhatikan ketersediaan bahan baku CPO dari lahan sawit yang ada, tanpa mengganggu alokasi untuk pangan, oleokimia dan ekspor. Artinya, produksi CPO harus cukup sedemikian hingga alokasi ekspor dapat dijaga di atas 30 juta ton per tahun, di samping adanya penambahan alokasi untuk B40.

Jangan sampai penghematan devisa dari impor solar justru mengurangi devisa dari ekspor CPO, termasuk menurunkan pendapatan BDPKS dari hasil Pungutan Ekspor (PE) yang justru berdampak pada kemampuan pembiayaan Program Biodiesel. (Mina, Dimas, Denis)

Inggris Hembuskan Angin Sejuk Bagi Sawit Indonesia



Airlangga Hartarto bertemu Menteri Perdagangan Inggris di London. (Biro Klip Kemenko Perekonomian/Instagram Airlangga Hartarto)

Seperti kata peribahasa, “saat satu pintu tertutup, ada pintu lainnya yang terbuka.” Begitu pun upaya Indonesia dalam memperjuangkan komoditas sawit di pasar global. Saat Uni Eropa terus merintangi masuknya produk sawit ke wilayahnya, maka peluang ke negara-negara lainnya masih terbuka lebar. Tanpa terkecuali Inggris, negeri kerajaan yang merupakan mantan anggota Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke Inggris untuk membahas langkah-langkah kemitraan dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin besar terhadap komoditas sawit Indonesia di pasar dunia. Dikutip dari website resmi Kemenko Perekonomian, pertemuan tersebut salah satunya menyoroti dampak dari usulan undang-undang Inggris tentang uji tuntas terhadap komoditas yang berisiko terhadap hutan.

Bagi Indonesia, aturan tersebut tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan penting untuk memiliki komitmen keadilan dalam memperlakukan produk-produk unggulan Indonesia, termasuk untuk komoditas kelapa sawit.

Sementara Pemerintah Inggris berkomitmen untuk membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko terhadap kelestarian hutan, tetapi dengan cara yang berbeda dari aturan yang diterapkan Uni Eropa.

Pemerintah Inggris lebih memilih pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan uji tuntas produk keberlanjutan. Pendekatan kemitraan dianggap

akan lebih luwes dalam melibatkan standarisasi dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil system (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO) yang dimiliki Indonesia. Sementara dengan pihak Uni Eropa, pengakuan sertifikasi nasional tersebut tidak dapat dicapai dengan serta merta. Indonesia bahkan bersekutu dengan Malaysia melalui Joint Task Force dalam upaya mendorong pengakuan tersebut.

Selain itu, Inggris juga berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap kehidupan petani kecil yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Aturan yang diberlakukan diharapkan tidak menimbulkan kerugian para petani kecil negara mitra. Berbeda dengan Uni Eropa yang dinilai tidak adil dengan memberikan tenggang waktu sebelum penerapan EUDR yang lebih menguntungkan pelaku UMKM di wilayahnya, di saat para petani kecil di Indonesia terancam tereliminasi dari rantai ekspor.

Kunjungan Pemerintah Indonesia dan Inggris tersebut menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak untuk terus melanjutkan dialog FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) sebagai forum global untuk mendiskusikan secara informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

IPOSS menilai pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam membangun kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi tantangan perdagangan komoditas sawit yang semakin kompleks di tingkat global. Kesepakatan Indonesia dan Inggris terkait Dialog FACT menunjukkan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan perdagangan komoditas yang terkait dengan deforestasi hutan tropis.

(Mina, Dimas, Denis)

Pentingnya Sinergitas Untuk Keberlanjutan Sawit



Ilustrasi minyak kelapa sawit. (Ai)

Pepatah mengatakan, “tak ada yang abadi.” Pun dalam industri pertanian. Bila tidak diantisipasi secara bijak, tidak distandarkan pada prinsip keberlanjutan, industri sawit bukan mustahil bisa punah di masa depan.

Sebelum membahas sawit, tampaknya kita perlu berkaca betul dari nasib industri agro lainnya, salah satunya teh. Komoditas yang dikenal berasal dari Tiongkok ini, pernah mengalami masa jayanya pada tahun 1941, saat itu teh di Indonesia seluas 200 ribu hektar yang dikelola 299 perusahaan, terdiri dari perkebunan besar seluas 125 ribu hektar dan perkebunan rakyat seluas 75 ribu hektar. Namun kini hanya tinggal 102 ribu hektar (Tahun 2021).

Penyusutan areal teh di atas terjadi masif pada periode tahun 2000 - 2020, lebih disebabkan karena turunnya nilai keekonomian teh Indonesia akibat rendahnya daya saing dilihat dari penurunan pangsa pasar global (Idjatnika, 2008).

Berdasarkan data statistik perkebunan, diketahui pangsa ekspor teh dari waktu ke waktu, yakni dari 70% pada tahun 1980 turun menjadi 31% pada tahun 2020. Hal ini menurunkan nilai pendapatan petani, di mana untuk pasar dalam negeri pun harga teh juga tidak membaik, karena dibanjiri produk impor. Hal ini menambah beban bagi industri teh secara keseluruhan.

Pengalaman yang panjang dalam budidaya teh sejak masa Pemerintah Hindia Belanda, hingga Indonesia Merdeka dan bahkan kini dengan adanya keterlibatan perusahaan besar negara (PBN), ternyata tidak mampu

menaikkan daya saing teh Indonesia di pasar global.

Nasib industri teh dalam batas tertentu sangat mungkin juga terjadi pada sawit. Beberapa pakar industri memandang, persoalan industri agro seperti teh, cengkeh, sawit dan komoditi lainnya akan menjadi rentan apabila terjadi gangguan pada sisi konsumsi. Gangguan tersebut dapat berupa isu negatif terhadap komoditi yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan suatu negara untuk menghambat perdagangan komoditas asal Indonesia. Akibatnya, pangsa pasar dapat terganggu dan berdampak pada harga dan volume perdagangan komoditas tersebut. Tentunya keseimbangan antara *supply* dan *demand* harus dijaga dengan baik agar harga tetap berada pada posisi menguntungkan baik bagi korporasi maupun bagi petani.

Dalam hal ini, diperlukan kolaborasi antara negara-negara utama penghasil sawit seperti Indonesia dan Malaysia, bukan hanya dalam hal menghadapi rintangan seperti kebijakan diskriminasi Uni Eropa, tetapi juga tentang masa depan komoditas ini. Dalam mencapai misi tersebut, kedua negara semestinya menghindari persaingan dan lebih bergandeng tangan sehingga tercipta kolaborasi.

Dalam penilaian IPOSS, sudah tepat Indonesia dan Malaysia sama-sama sepakat untuk mengusahakan kebun sawit yang menjunjung tinggi aspek keberlanjutan dan *traceability*. Tidak hanya untuk memaksimalkan upaya perlawanan terhadap diskriminasi Uni Eropa, lebih dari itu, untuk menjaga industri kelapa sawit bagi generasi masa depan umat manusia. (Mina, Dimas, Denis)

Data Rujukan Uni Eropa Layak Dipertanyakan



Rawa Pening dikategorikan sebagai hutan? (Semarang.rent)

Sudah jadi rahasia umum Uni Eropa sangat getol membuat regulasi yang merintang ekspor kelapa sawit. Dalihnya selalu karena industri kelapa sawit sebagai dalang deforestasi. Dalam upaya penjejalan produk sawit tersebut, *European Union Forest Observatory* (EUFO) menggunakan *Global Forest Map* (GFM) sebagai peta tematik atau tool yang memuat data hutan di seluruh dunia. Namun, apakah GFM andalan mereka itu akurat?

Dituding deforestasi, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Peta tematik GFM dianalisis dan dibandingkan dengan peta tematik Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) yang dikelola Kementerian LHK. Hasilnya cukup mengejutkan, informasi yang dimuat GFM ternyata layak diragukan. Terdapat *inaccuracy / overestimating* pada GFM yang mengklaim berlebihan jumlah tutupan hutan di Indonesia. Padahal objek-objek yang diidentifikasi oleh GFM sebagai tutupan hutan itu sama sekali bukan hutan.

Sebagian objek itu faktanya adalah berupa semak belukar, lahan pertanian, perkebunan, bahkan perairan tawar. Kekeliruan data GFM yang menunjukkan adanya tutupan hutan antara lain pada Danau Rawa Pening di Jateng, beberapa ruas jalan di DKI Jakarta, perkebunan kopi rakyat di Bali, hingga lahan-lahan sawah di banyak tempat, dan lain sebagainya.

Kenyataan bahwa perangkat tinjau yang digunakan Uni Eropa tidak akurat dapat menjadi celah bagi Indonesia untuk menghadapi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Indonesia berbekal *database*

hutan yang lebih baik dapat mendesak Uni Eropa untuk meninjau kembali definisi dan metode yang digunakan dalam GFM, sehingga dapat dicapai pemahaman yang sama terkait definisi hutan, batas hutan, tutupan hutan dan bahkan definisi deforestasi itu sendiri.

Dalam hal ini, harmonisasi GFM dan SIMONTANA dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi hambatan ekspor ke Uni Eropa. Setidaknya upaya harmonisasi data dapat dilakukan Pemerintah melalui kedutaannya di luar negeri, khususnya KBRI Brussels yang merupakan perwakilan RI untuk Uni Eropa. Di samping itu, Pemerintah melalui KLHK perlu terus mengoptimalkan pengecekan di lapangan untuk memastikan ketidaksesuaian lainnya yang terdapat pada GFM dengan kondisi dan fakta yang ada. Tentunya, hasil pengecekan ini juga dapat menjadi bahan perbaikan GFM dan SIMONTANA sekaligus.

Perbedaan soal konsep hutan telah memantik berbagai perdebatan dan pandangan yang relatif tajam, khususnya antara negara penghasil minyak nabati (khususnya sawit) dengan Uni Eropa. Cara pandang Uni Eropa terhadap sawit juga perlu digeser, mengingat sawit bukanlah faktor utama penggerak deforestasi di muka bumi ini. Kedua belah pihak sudah waktunya untuk duduk bersama kembali untuk mencari jalan tengah, agar dapat mencapai kesepakatan baru dalam memandang sawit secara lebih bijak.

Di atas itu semua, diharapkan kedua belah pihak juga menjunjung tinggi *fairness* dalam perdagangan minyak nabati di pasar global. Konsep menang-kalah pada hakekatnya hanya akan memberikan dampak buruk.

(Mina, Dimas, Denis)

Sawit: Penopang Ekspor Nonmigas



Ilustrasi kegiatan ekspor CPO. (Canva)

Indonesia merupakan negara pengekspor berbagai komoditas pangan. Namun ternyata minyak kelapa sawitlah yang menjadi paling utama. Dari 2018 hingga 2022 kontribusi nilai ekspor komoditas minyak kelapa sawit terhadap total nilai ekspor industri pangan mencapai rata-rata sebesar 60,32 persen.

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah telah menjadi salah satu pemain kunci dalam pasar global untuk berbagai jenis ekspor, mulai dari produk hasil pertanian, industri pengolahan, hingga pertambangan. Dari ketiga jenis produk ekspor tersebut, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama pendukung perekonomian negara.

Komoditas industri pengolahan antara lain dikelompokkan lagi menjadi komoditas pangan, logam dasar, bahan kimia, pakaian jadi, kertas, karet dan lainnya. Berdasarkan kontribusinya terhadap total nilai ekspor nonmigas, selama kurun waktu lima tahun 2018-2022, komoditas industri pengolahan memiliki peranan yang dominan dengan rata-rata sebesar 80,3 persen. Sementara dalam jajaran komoditas industri pangan, minyak kelapa sawit merupakan produk yang memiliki kontribusi terbesar dimana nilai ekspornya terhadap total nilai ekspor industri pangan rata-rata sebesar 60,32 persen.

Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian menyebutkan kelapa sawit menyumbang 70 persen kinerja ekspor industri pangan Indonesia atau naik lagi 10 persen dari tahun sebelumnya. Sektor pengolahan sawit dinilai memiliki peran penting dan strategis dalam menopang kestabilan serta ketahanan perekonomian nasional.

“Yang perlu kami highlight adalah betapa industri pengolahan sawit punya peran penting dalam

pengembangan industri di Indonesia,” jelas Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin, Setia Diarta.

Berdasarkan data BPS, peningkatan ekspor industri pengolahan pada awal tahun 2024 juga tercatat mendapat sumbangan besar dari produk kelapa sawit di saat ekspor komoditas lainnya mengalami penurunan. Plt. Kepala BPS, Amalia Widyasanti menyatakan bahwa kelapa sawit tetap menjadi komoditas ekspor unggulan yang mampu mendongkrak penerimaan devisa negara. Dalam catatan Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia per Desember 2023 tercatat sebesar 146,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan November 2023 sebesar 138,1 miliar dolar AS. Pada tahun itu kontribusi industri sawit sendiri diklaim telah mencapai 20,6 miliar dolar AS.

IPOSS menilai industri pengolahan khususnya dari komoditas kelapa sawit, telah menjadi sektor strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dikarenakan besarnya pangsa ekspor dan besarnya serapan industri dalam negeri. Pemerintah perlu terus menjaga pasar ekspor agar tetap tinggi di samping upaya hilirisasi produk turunan kelapa sawit dalam meningkatkan nilai tambah sawit.

Saat ini, hilirisasi sawit di Indonesia baru mencapai 179 jenis produk, itupun belum semua menjadi produk komersil. Diperlukan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi serta pihak lainnya untuk terus mengembangkan produk-produk hilir kelapa sawit agar dapat menjadi produk komersil yang berdaya saing sehingga dapat memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi sawit untuk Indonesia. (Mina, Dimas, Denis)

Ketika Minyak Sawit Difitnah



Ilustrasi produk turunan sawit. (Canva)

Black campaign CPO yang dilakukan pihak-pihak tertentu semakin masif seiring pesatnya penggunaan saluran media sosial. Tuduhan miring terhadap produk kelapa sawit tidak sekadar berdalih deforestasi, namun juga dikesankan sebagai produk yang tidak sehat. Asam lemak jenuh minyak sawit dianggap biang kolesterol jahat. Sejauh mana kebenaran tuduhan negatif itu?

Fakta berdasarkan riset ilmiah mengungkapkan, kadar lemak jenuh dan tak jenuh yang terkandung dalam minyak sawit dinilai paling seimbang dibandingkan minyak nabati lainnya. Menurut Dr. Puspo Edi Giriwono, Kepala Seafast Centre IPB, kandungan asam lemak jenuh dan tak jenuh pada minyak sawit hampir seimbang, yakni 50:50. Hal ini membuat minyak sawit menjadi paling ideal untuk menggoreng. Dengan stabilitasnya yang tinggi, minyak sawit mampu menghasilkan produk goreng yang lebih awet dan tidak mengandung radikal bebas tinggi (GAPKI, 2017).

Uniknya, tidak sedikit masyarakat umum yang meyakini minyak kelapa dan mentega merupakan pengganti minyak sawit yang lebih sehat untuk keperluan menggoreng. Padahal, keduanya justru memiliki kandungan asam lemak jenuh yang jauh lebih tinggi. Lihat prosentasenya antara minyak sawit dan minyak kelapa: 51% : 91% (USA Today).

“Pengganti (minyak sawit) seperti mentega dan minyak kelapa memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih tinggi, menjadikannya kurang seimbang dalam diet sehari-hari,” jelas Dr. Jonathan Ellen, CEO Labrador Health (Financial Express).

Aspek lainnya diungkap peneliti dari Institut Penelitian Farmakologi Milan, dilansir dari infosawit.com menyimpulkan bahwa minyak sawit tidak berpengaruh pada kolesterol. Asam palmitat, salah satu komponen minyak sawit tidak berdampak signifikan memengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, minyak sawit mengandung nutrisi penting seperti vitamin E dan vitamin A.

Sementara Dokter Spesialis Gizi Klinik, Putri Sakti, dilansir dari Kompas.com menekankan bahwa minyak sawit merupakan bahan nabati yang tidak mengandung kolesterol, sebagaimana minyak nabati lainnya. Menurutnya, yang menjadi sumber kolesterol adalah bahan makanannya seperti daging merah dan *seafood*. Bahkan, penggunaan minyak goreng juga bisa saja memicu kolesterol bila cara memasaknya salah, seperti minyak yang digunakan secara berulang (mengonsumsi minyak jelantah).

Dari beberapa fakta ilmiah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa klaim minyak sawit sebagai produk yang tidak sehat bisa dikatakan sama sekali tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Masyarakat juga tampaknya masih kekurangan informasi yang akurat dari mulai hal sederhana seperti penggunaan minyak goreng, hingga isu yang cukup besar tentang deforestasi.

Banyak kepentingan di balik keberhasilan Indonesia mengembangkan perkebunan sawit yang kini luasannya sudah mencapai kisaran 17 juta hektar. Informasi yang sah perlu terus dihembuskan oleh para pihak terkait sehingga hilirisasi sawit semakin masif dan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa Indonesia. (Mina, Dimas, Denis)

Pentingnya *Mandatory SAF*



Ujicoba penerbangan perdana menggunakan bioavtur J2.4. (Pertamina)

Dalam menghadapi tantangan pemanasan global, penerbangan sebagai penyumbang 2% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) perlu memainkan peran penting dalam upaya dekarbonisasi. Penggunaan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) menjadi salah satu solusi krusial dalam mengurangi emisi karbon di sektor penerbangan.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyedia SAF, didorong oleh ketersediaan *feedstock* SAF yang besar baik dari *main product*, *by-product* maupun *waste* atau residu. Berdasarkan daftar *feedstock* SAF yang dirilis oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), jenis bahan baku yang dapat dimanfaatkan di Indonesia, seperti Minyak Sawit (CPO dan CPKO) sebagai *main product*, *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD) sebagai *by-product*, serta minyak jelantah atau *Used Cooking Oil* (UCO) dan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) sebagai *waste*.

Ketersediaan berbagai *feedstock* tersebut dapat dikatakan berlimpah di Indonesia, mengingat Indonesia adalah produsen utama minyak nabati dunia, khususnya minyak sawit.

Indonesia berpotensi besar dalam penyediaan bahan baku SAF berteknologi *Hydrotreated Esters and Fatty Acids* (HEFA). Berdasarkan proyeksi tim IPOSS, di Indonesia potensi ketersediaan kedua bahan baku tersebut (UCO & POME) pada 2030 diperkirakan sebesar 5,7 juta kL, yang dapat menghasilkan 4,3 juta kL SAF.

Jika Indonesia mengikuti target IATA untuk tingkat pencampuran SAF sebesar 5% (J5), maka diperlukan sekitar 0,31 juta kL SAF. Mengingat potensi *feedstock* SAF dari UCO dan POME, Indonesia diyakini mampu

memenuhi target tersebut, sepanjang pabrik *refinery* SAF telah terpasang dan produk SAF yang dihasilkan telah lulus uji coba. Tentunya, langkah ini dapat dimulai apabila kebijakan SAF sudah mulai dimandatkan oleh pemerintah.

Sementara itu, di tingkat global, negara-negara lain telah mengambil langkah besar dalam mendorong penggunaan SAF. Seperti Uni Eropa (UE) menargetkan penggunaan SAF melalui kebijakan *mandatory* sebesar 2% pada 2025 dan 6% pada 2030. Singapura juga mengambil langkah serupa dengan mengumumkan target penggunaan SAF sebesar 1% di 2026 dan 3-5% di 2030.

Saat ini, di Indonesia, SAF baru diproduksi oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dengan teknologi pembuatan energi ramah lingkungan, KPI mampu menghasilkan SAF J2.4 sebesar 1.350 kilo liter per hari, atau jika diproduksi setiap hari maka diperkirakan dalam satu tahun akan tersedia SAF J2.4 sebanyak 405 ribu kilo liter.

Di tengah tingginya tuntutan terhadap bahan bakar yang rendah emisi karbon, tentunya capaian yang berhasil ditorehkan oleh Pertamina ini perlu diapresiasi. Walaupun komposisi dan volume produksinya masih sedikit, namun hadirnya produk SAF Pertamina ini, sudah menjadi bukti keseriusan Indonesia menjawab tantangan global.

Ke depan, untuk memenuhi tantangan penurunan emisi karbon, maka pemerintah perlu memandatkan tingkat pencampuran SAF menjadi J2.4 untuk seluruh penerbangan. Komposisi tersebut dapat ditingkatkan menjadi J5, J10 hingga J50. Namun untuk memenuhi kebutuhan itu, kapasitas pengolahan SAF harus ditingkatkan. Artinya, terbuka peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk menghasilkan kilang-kilang baru untuk memproduksi SAF. Peluang itu harus ditangkap. Sebab, jangan sampai Indonesia yang memiliki bahan baku yang berlimpah justru mengimpor SAF hanya karena tidak adanya dorongan yang cukup dari Pemerintah pada industri dalam negeri.

Disinilah pentingnya kebijakan SAF dimandatkan oleh Pemerintah, sehingga akan tumbuh *demand* yang pada akhirnya mendorong terciptanya *supply*.

(Aura, Dimas)

Bioenergy dari POME, Kenapa Tidak?



Kilang Pertamina menghadirkan Bioavtur-SAF kebutuhan pasar terkait bahan bakar terbarukan di industri penerbangan sipil. (Pertamina)

Sebagai salah satu industri yang strategis di Indonesia, Kelapa Sawit kini tidak hanya memperoleh pendapatan dari produk utama (*main product*) saja. Tetapi produk sampingan dan limbahnya pun memiliki nilai. Seperti cangkang (*palm kernel shell*), saat ini dapat dihargai (lokal) dengan harga Rp 1.000 - 1.400 per kg dengan nilai ekspor Rp 1.400 - 1.800 (BPS/Exim). Tidak hanya cangkang, ada juga fiber, tandan kosong, yang tidak kalah nilainya.

Sebagaimana praktik di setiap industri, pasti akan selalu ada residu ataupun limbah dari setiap proses pengolahan. Begitu juga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pabrik pengolahan produk turunannya, juga menghasilkan *by-product* dan limbah. Hebatnya, semua *by-product* dan limbah tersebut juga memiliki nilai tinggi karena manfaatnya. Misalnya PFAD singkatan dari *Palm Fatty Acid Distillate*, merupakan residu atau produk samping (*by-product*) yang dihasilkan dari proses pengolahan CPO menjadi RBDPO (*Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil*), ternyata nilainya berkisar antara USD 800 - 1.000 / ton.

Tentunya nilai tersebut hanya dapat dinikmati pemilik pabrik *refinery* saja. Hal yang sama dengan limbah PKS yang sering disebut *Palm Oil Mill Effluent* (POME).

Secara fisik, POME terlihat kental dan berwarna sedikit kecoklatan. POME terdiri dari 73,5% air, 2,4% kotoran, 16,1% trigliserida dan 8% FFA (*free fatty acid*) berupa minyak. Selama ini, POME secara konvensional hanya dimanfaatkan sebagai pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman. Namun pemanfaatan konvensional tersebut memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga pada prakteknya POME lebih sering langsung diolah untuk dihilangkan kandungan logam beratnya. Lalu setelah memenuhi baku mutu lingkungan POME dialirkan ke sungai.

Saat ini ada beberapa alternatif pemanfaatan POME selain pemanfaatan konvensional di atas, yakni untuk menghasilkan bioenergy. Salah satunya, POME diproses menjadi biogas dan dengan metode *methane capture* di kolam limbah, biogas dapat menghasilkan listrik. Selain itu, minyak dan lemak yang terkandung POME jika diolah dengan teknologi HEFA (*Hydrotreated Esters and Fatty Acids*), dapat menghasilkan bioavtur atau lebih dikenal dengan nama SAF (*Sustainable Aviation Fuel*).

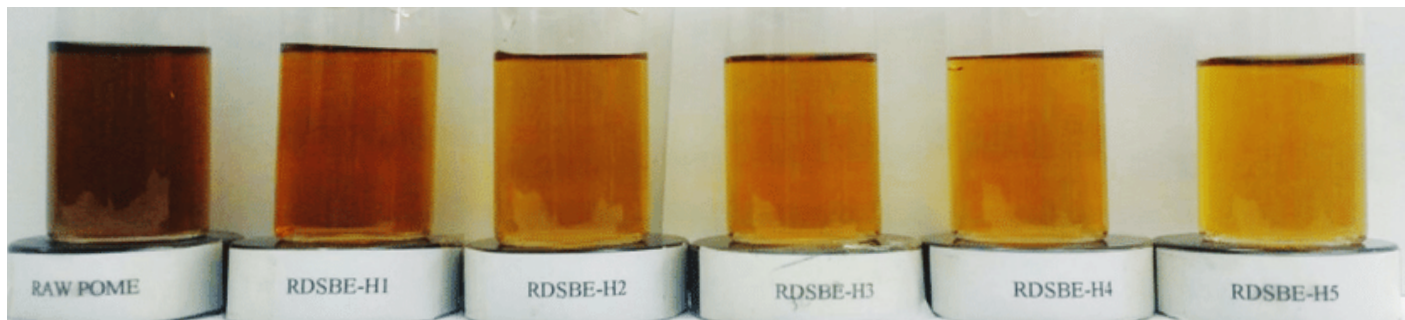
Diperkirakan, kuantitas minyak yang berpotensi diambil dari kolam limbah di seluruh PKS di Indonesia (± 1.300 unit) dapat mencapai lebih dari 3 juta kL per tahun. Dengan besarnya potensi tersebut, dapat menghasilkan SAF untuk bahan bakar pesawat terbang. Hadirnya SAF berbasis POME turut mendukung program dekarbonisasi pemerintah di sektor penerbangan.

Jika di negara jiran seperti Malaysia saja, POME sudah dimanfaatkan menjadi SAF, mengapa Indonesia tidak? Tentu SAF berbasis POME ini dapat menimbulkan persaingan baru. Tidak terkecuali antara Indonesia dan Malaysia yang memang sejak lama kerap terlibat dalam kontestasi kelapa sawit dan produk pangan lainnya.

Tetapi yang pasti, pemanfaatan POME lebih direkomendasikan untuk menghasilkan *bioenergy* daripada produk utamanya. Sebab alokasi produk utama sudah cukup besar untuk biodiesel, pangan dan ekspor. Di sisi lain, SAF berbasis POME akan lebih terjamin dari segi ketersediaan bahan baku, juga sekaligus dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan PKS, penurunan emisi karbon, dan pada akhirnya menciptakan ekonomi sirkular.

(Sylvi, Dimas)

Berapa sih Potensi POME untuk SAF?



Beberapa sample POME yang sudah diproses dengan berbagai macam suhu dan pemutih (Researchgate)

Produk sawit terus mengalami hilirisasi. Sampai saat ini sudah terdapat kisaran 179 produk turunan dan konon masih menyimpan potensi sebanyak 30 persen. Paling mutakhir, limbah cair sawit atau yang dikenal dengan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) dapat diubah menjadi bioenergy atau sebagai bahan baku bioavtur atau *Sustainable Aviation Fuel* (SAF). Sawit memang sebuah berkah bagi Indonesia.

Kalaulah dalam beberapa waktu terakhir banyak komentar miring tentang sawit, maka sebenarnya hal itu merupakan konsekuensi dari persaingan bisnis semata. Banyak produk berbasis minyak nabati yang “iri” terhadap sawit yang mampu menghasilkan banyak sekali manfaat. Termasuk diantaranya berupa produk yang menjadikan bahan bakar pesawat jauh lebih ramah lingkungan.

Dengan asumsi kandungan minyak 2-5% di dalam POME, maka dari setiap 1 ton produksi CPO berpotensi dapat menghasilkan 0,06-0,20 ton minyak POME, (tergantung pada tingkat efisiensi pabrik). Jadi, apabila produksi CPO di Indonesia mencapai 50 juta ton, maka diperkirakan tersedia 3-10 juta ton minyak POME. Di beberapa negara maju, POME sudah digunakan untuk biodiesel, seperti Jerman, China, Malaysia, dan Singapura.

Di tengah perkembangan POME sebagai bahan SAF, *International Civil Aviation Organization* (ICAO) belum mempublikasikan kemampuan dekarbonisasi SAF berbahan baku POME, sehingga, belum diketahui secara spesifik sejauh mana kapasitas penurunan emisi dengan produk SAF dari POME ini. ICAO (2024) sudah memasukkan POME dalam daftar positif bahan baku bioavtur atau SAF dan dikategorikan sebagai residu. Sebagai gambaran, penggunaan POME untuk biodiesel memiliki potensi pengurangan emisi karbon sebesar 126,4 kg per ton lebih rendah dibandingkan berbahan bakar fosil (Santoso dkk., 2017).

Karena sifatnya sebagai residu, tentu saja penggunaan POME dapat lebih leluasa dibandingkan penggunaan CPO, karena tidak bersaing dengan alokasi pangan. Di sisi lain, sebagai limbah, penggunaan POME untuk SAF dapat mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Bahkan dari *Indirect Land Use Change* (ILUC), penggunaan limbah ini dapat dianggap nihil emisi. Dengan demikian, SAF berbahan baku POME akan dapat memenuhi kriteria bahan baku yang berkelanjutan (*sustainable*).

Kedepan, hitung-hitungan tentang manfaat POME bagi industri penerbangan ini kemungkinan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya Indonesia melaksanakan dekarbonisasi. Melalui sawit, Indonesia bisa membuktikan kemampuannya untuk mengambil langkah-langkah yang bersahabat dengan lingkungan. Sawit yang sering dilihat sebelah mata, lama kelamaan akan menjadi produk primadona yang tidak terbantahkan.

Sebagai tambahan informasi bahwa maskapai penerbangan Indonesia, Garuda, telah berhasil melakukan ujicoba penerbangan Jakarta – Solo PP pada 27 Oktober 2023 dengan menggunakan bahan bakar bioavtur berbahan minyak inti kelapa sawit (J2.4).

Berdasar beberapa data ilmiah seperti diatas, maka IPOSS yang didirikan 2022 lalu tegas berpendapat bahwa sawit yang dikelola secara profesional dan bertanggungjawab akan mampu memberikan kesejahteraan jutaan petaninya serta berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, *think tank* bidang kelapa sawit ini, melalui berbagai kegiatannya terus mendorong kebijakan yang tepat bagi masa depan sawit Indonesia. (Raisya, Dimas)

Dana Bagi Hasil: Pilar Kesejahteraan Daerah Sawit



Ilustrasi dana bagi hasil (Freepik-canva)

Ekspor kelapa sawit dan turunannya menempati posisi kedua industri paling memberikan *cuan* setelah batu bara. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam situs resminya mengklaim sawit menjadi penopang ekonomi Indonesia yang mampu menghasilkan devisa sebesar Rp 600 triliun sepanjang tahun 2023. Namun dibalik besarnya devisa yang masuk, apakah hanya pekebun sawit saja yang merasakannya, bagaimana dengan alokasinya untuk daerah dan masyarakat sekitar kebun, apakah juga dapat merasakan langsung dampaknya?

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) telah menetapkan kebijakan dana bagi hasil sawit untuk daerah. Dana tersebut memang berasal dari APBN tetapi sumber perolehannya berasal dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya, di mana nilainya minimal 4% dari hasil PE dan BK. Pada 2023 misalnya, Pemerintah menganggarkan DBH Sawit yang sebanyak Rp 3,4 triliun, dengan alokasi yang bervariasi antar daerah, bergantung pada status daerahnya.

Terdapat 350 daerah (provinsi dan kabupaten) dan 4 daerah otonom baru di Papua yang ditetapkan mendapatkan alokasi DBH sawit tersebut. Pemerintah provinsi akan mendapatkan alokasi sebesar 20%, 60% untuk kabupaten/kota penghasil sawit, dan 20% untuk daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil sawit. Kebijakan ini dapat dikatakan 'bak oase' di padang pasir. Mengingat selama ini sudah

lebih dari 10 tahun pemerintah daerah menyuarakan hal ini. Artinya, kebijakan ini perlu diapresiasi karena dapat lebih memberi makna akan hadirnya industri sawit di daerah.

Walaupun DBH Sawit ini sudah dialokasikan dalam PMK 91/2023 tersebut, tetapi dananya tidak bisa langsung diakses. Sebab Pemda harus memenuhi persyaratan tersendiri, seperti adanya dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), dan indikator lainnya. Penyaluran dana dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap, serta dapat dilakukan evaluasi berupa penundaan atau penghentian penyaluran apabila Pemda dinilai tidak memenuhi persyaratan DBH Sawit.

IPOSS berpandangan, adanya kebijakan DBH sawit ini haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit. Pendataan perkebunan sawit rakyat sebaiknya diprioritaskan agar dapat diperoleh data pekebun yang akurat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tekanan EUDR dalam hal *traceability* produk minyak sawit yang diekspor ke Eropa.

Selain itu, petani juga dapat dibantu agar mampu menjalankan praktik budidaya sawit yang berkelanjutan hingga memperoleh sertifikat ISPO serta diberikan bantuan jamsostek. Program ini sangat penting dilakukan, di samping program Pemda lainnya seperti penyusunan dokumen RAD-KSB, serta rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi. (Mina, Dimas, Denis)

ISPO & MSPO Bukan Produk Desakan Global



Memprotes keputusan UE yang hanya mengimpor minyak sawit berkelanjutan setelah tahun 2020. (Alamy)

Sejak Tahun 2023, industri kelapa sawit dunia dibuat gempar dengan dikeluarkannya aturan *European Union for Deforestation Regulation* (EUDR). Uni Eropa berdalih, aturan tersebut bertujuan meminimalkan risiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan impor komoditas ke wilayahnya.

Pada perkembangannya, EUDR menimbulkan banyak pertentangan dari berbagai kalangan antara lain karena proses pembahasannya dinilai tidak melibatkan negara-negara terkait. Akibat EUDR ini pula, negara-negara pengekspor komoditas kelapa sawit ke Uni Eropa, seperti Indonesia dan Malaysia, menjadi seolah-olah belum menerapkan standar keberlanjutan.

Merespon hambatan tersebut, Indonesia dan Malaysia seirama menegaskan, bahwa komoditas kelapa sawit mereka sudah menerapkan pola keberlanjutan, yang antara lain melalui *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO).

“Kita tidak mau dituduh tidak *sustainable*, sebab kita sudah memenuhi persyaratan tapi mengapa masih mempunyai hambatan-hambatan. Sebab kita mempunyai ISPO, dimana di dalam ISPO tersebut telah memenuhi persyaratan EU terkhusus adanya tuduhan mengenai deforestasi,” ungkap Staf ahli Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, dikutip dari sawitindonesia.com.

Pemerintah Malaysia juga berkomitmen untuk terus menolak tuduhan Uni Eropa dengan melakukan perbaikan tata kelola industri sawit melalui upaya sertifikasi MSPO dengan tiga kriteria utama: pemegang sertifikasi harus memiliki hak atas lahan, penanaman kelapa sawit tanpa sertifikat tanah dianggap ilegal, dan harus dipastikan tidak ada aktivitas deforestasi yang ditimbulkan.

Sebenarnya, ISPO dan MSPO didorong bukan hanya karena EUDR atau desakan global semata. Melainkan karena aspek keberlanjutan ini merupakan tanggung jawab industri sawit demi masa depan industri itu tersendiri. Lagi pula, Uni Eropa bukanlah negara tujuan utama ekspor sawit dari Indonesia maupun Malaysia. Pangsa ekspor terbesar minyak sawit Indonesia adalah India dan China yakni berkisar 30 persen, sama halnya dengan Malaysia.

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini tengah mendorong realisasi 100% ISPO. Upaya yang dilakukan antara lain dengan merevisi Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang bersifat wajib bagi semua pelaku usaha kelapa sawit tanpa terkecuali. Di samping itu, adanya Dana Bagi Hasil (DHB) Sawit yang dicanangkan Pemerintah juga dapat dialokasikan untuk membiayai proses sertifikasi ISPO bagi pekebun. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kendala biaya dalam proses sertifikasi.

“Yang tadinya hanya sertifikasi awal (tahun pertama) saja yang dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan biaya untuk audit *surveillance* dibiayai sendiri (mandiri). Namun, dalam Perpres yang baru (direvisi) nanti telah dirumuskan bahwa biaya sertifikasi petani dari awal hingga audit *surveillance*, kedua, ketiga, keempat, dan kelima (satu siklus) akan dibiayai oleh Pemerintah. Sedangkan pembiayaan siklus kedua (tahun ke 6) baru dibiayai sendiri,” jelas Rismansyah Danasaputra, Ketua Tim Penerapan dan Percepatan ISPO (TP2 ISPO).

Penerapan sertifikasi keberlanjutan berarti melakukan pendataan kebun sawit secara baik. Dengan demikian berbagai upaya pembenahan industri sawit berkelanjutan dapat berjalan optimal serta tepat sasaran. Para pihak yang mengusahakan kebun sawit sudah seharusnya memahami betapa pentingnya aspek keberlanjutan, sebab kelapa sawit bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi masa depan.

(Mina, Dimas, Denis)



Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP, Ahmad Mina**,
Staf Redaksi: **Dwivayani, Oktadianti**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id